

ANALISIS PRINSIP KEADILAN AKAD RAHN TASJILI PADA PRODUK PEMBIAYAAN GADAI KENDARAAN SYARIAH (GENERASI) DI KSPS NURI JATIM

Mohammad Mahmudi¹, Zainul Arifin²

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Al Mujtama Pamekasan

²Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

E-mail: ¹ mahmudi@stai-almujtama.ac.id ² zainularifin83dafa@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of the principle of justice in the rahn tasjili contract within the Sharia vehicle pawn financing product (GENERASI) at KSPS NURI Jatim. The rahn tasjili contract is a Sharia-based financing model designed to provide financial ease for the community while adhering to Sharia principles. In this context, the principle of justice serves as a crucial foundation for service providers. The study employs a qualitative approach with descriptive analysis. Data were collected through in-depth interviews with relevant parties, document studies, and direct observations of the financing processes at KSPS NURI Jatim. The findings reveal that the principle of justice is applied through three key mechanisms. First, cost transparency allows customers to clearly understand the charges, minimizing uncertainty (gharar). Second, profit margins are set reasonably through mutual agreements, considering customers' financial capacity. Third, rights and obligations are proportionally fulfilled, ensuring that no party is disadvantaged. These findings significantly contribute to the development of the rahn tasjili contract as a Sharia-compliant financing model. The implementation of justice principles can serve as a reference for other Islamic financial institutions and enhance public trust in Sharia financial services. Additionally, this study opens opportunities to expand the application of rahn tasjili as an inclusive and equitable Sharia financial solution.

Keywords: *Rahn Tasjili, Principle of Justice, Shariah Vehicle Collateral Financing, KSPPS NURI Jatim*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan akad *rahn tasjili* pada produk pembiayaan gadai kendaraan syariah (GENERASI) di KSPS NURI Jatim. Akad *rahn tasjili* adalah salah satu bentuk pembiayaan berbasis syariah yang bertujuan memberikan kemudahan finansial kepada masyarakat tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, prinsip keadilan menjadi landasan utama yang harus diwujudkan oleh penyelenggara layanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Data

diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait, studi dokumen, dan observasi langsung pada proses pembiayaan di KSPS NURI Jatim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan diterapkan melalui tiga mekanisme utama. Pertama, transparansi biaya memungkinkan nasabah memahami secara jelas rincian biaya yang dikenakan, sehingga meminimalkan unsur ketidakpastian atau *gharar*. Kedua, penetapan margin keuntungan dilakukan secara wajar melalui kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan kemampuan finansial nasabah. Ketiga, pemenuhan hak dan kewajiban dilakukan secara proporsional untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan. Temuan ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan akad *rahn tasjili* sebagai model pembiayaan berbasis syariah. Implementasi prinsip keadilan ini dapat menjadi referensi bagi lembaga keuangan syariah lainnya dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Selain itu, penelitian ini membuka peluang untuk memperluas penerapan akad *rahn tasjili* sebagai solusi keuangan syariah yang inklusif dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Rahn Tasjili, Prinsip Keadilan, Pembiayaan Gadai Kendaraan Syariah, KSPS NURI Jatim*

PENDAHULUAN

Akad rahn tasjili merupakan salah satu bentuk produk pembiayaan syariah yang terus berkembang di Indonesia. Produk ini menawarkan solusi pembiayaan berbasis syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Salah satu lembaga keuangan syariah yang menyediakan produk ini adalah KSPPS NURI Jatim melalui produk GENERASI (Gadai Kendaraan Syariah). Produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dengan skema gadai kendaraan sebagai jaminan. Prinsip keadilan menjadi salah satu elemen fundamental operasional produk ini, sebagaimana yang diamanatkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Nuri Jawa Timur (KSPPS NURI JATIM), yang sebelumnya dikenal sebagai KSN JATIM, adalah koperasi syariah berskala provinsi di Jawa Timur. Berkantor pusat di Jalan Raya Palduding-Pegantenan, Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan, koperasi ini didirikan pada 1 Desember 2008 oleh para tokoh alumni Pondok Pesantren Banyuwangi. Resmi beroperasi

pada 1 Januari 2009, kantor pelayanan pertama koperasi ini berlokasi di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan.

Dalam perjalanan kelembagaannya, KSPPS NURI JATIM memperoleh legalitas badan hukum dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pamekasan dengan Nomor 02/BH/XVI.19/2010 pada 29 April 2010. Tidak hanya fokus pada wilayah Kabupaten Pamekasan, koperasi ini memperluas jangkauan pelayanan simpan pinjam ke Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep. Pada tahun 2014, koperasi ini mengajukan alih bina kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Dengan pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor: P2T/10/09.02/01/XII/2014, tertanggal 11 Desember 2014, koperasi ini secara resmi menjadi binaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2019, nama koperasi ini diubah menjadi KSPPS NURI JATIM.¹

Sebagai lembaga keuangan non-bank, KSPPS NURI JATIM memiliki misi untuk menjadi solusi pembiayaan berbasis syariah bagi masyarakat berekonomi kecil. Koperasi ini menyediakan berbagai bentuk simpanan, seperti simpanan wajib, simpanan berjangka, dan simpanan pendidikan, serta menawarkan pembiayaan, termasuk gadai emas, gadai kendaraan, dan pembelian rumah. Dengan prinsip koperasi syariah, KSPPS NURI JATIM berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggotanya, sesuai dengan mottonya: "Membangun Peradaban Ekonomi Umat Berbasis Syariah."²

Prinsip keadilan menjadi landasan utama setiap transaksi di KSPPS NURI JATIM, termasuk pada produk GENERASI. Prinsip ini diwujudkan bentuk transparansi, kewajaran biaya, dan penghormatan terhadap hak serta kewajiban setiap pihak. Kajian mengenai penerapan prinsip keadilan akad rahn tasjili menjadi sangat relevan, mengingat keadilan adalah inti dari ekonomi Islam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip

¹ "Sekilas Sejarah » KSPPS NURI JATIM," *KSPPS NURI JATIM*, n.d., accessed January 7, 2025, <https://nuriyatim.com/sekilas-sejarah/>.

² Fahrizal Muhaini, "Pengaruh Kualitas Layanan Dan Citra Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Minat Menabung Anggota Di KSPPS NURI JATIM Cabang Pakong Pamekasan" (diploma, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA, 2024), accessed January 7, 2025, <http://etheses.iainmadura.ac.id/7616/>.

keadilan diterapkan praktik akad rahn tasjili pada produk pembiayaan gadai kendaraan syariah (GENERASI) di KSPPS NURI JATIM.³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dalam konteks penerapan prinsip keadilan pada akad *rahn tasjili* di produk pembiayaan gadai kendaraan syariah (GENERASI) di KSPS NURI Jatim. Desain deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara rinci mekanisme penerapan prinsip keadilan dalam praktik tersebut.

1. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilakukan di KSPS NURI Jatim sebagai lokasi pelaksanaan akad *rahn tasjili*. Subjek penelitian mencakup manajer lembaga, karyawan yang terlibat dalam pengelolaan produk pembiayaan, serta nasabah yang menggunakan produk pembiayaan *rahn tasjili*.

2. Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa teknik berikut:

- a. Wawancara Mendalam: Wawancara dilakukan dengan pihak penyedia layanan (manajer dan staf) serta nasabah untuk mendapatkan informasi mengenai implementasi prinsip keadilan, termasuk transparansi biaya, penetapan margin keuntungan, dan pemenuhan hak serta kewajiban. Teknik ini memungkinkan eksplorasi pandangan subjek secara mendalam.⁴
- b. Observasi: Observasi dilakukan secara langsung terhadap proses akad *rahn tasjili* di kantor KSPS NURI Jatim untuk mendapatkan gambaran nyata pelaksanaan prinsip keadilan. Peneliti mencatat interaksi antara penyedia layanan dan nasabah, termasuk transparansi informasi yang diberikan.⁵

³ Rifqun Nisa' and Andriani Samsuri, "The Competitive Advantages of NURI East Java Savings and Loans Cooperatives and Sharia Financing in the Perspective of the Diamond Strategy," *International Conference on Islamic Economic (ICIE)* 1, no. 2 (2022): 310–328.

⁴ Yin, R. K. (2011). *Qualitative Research from Start to Finish*. New York: The Guilford Press.

⁵ Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

3. Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Peneliti mengidentifikasi tema-tema utama terkait prinsip keadilan, seperti transparansi biaya, margin keuntungan, dan pemenuhan hak serta kewajiban. Analisis dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- 1) Membaca ulang data wawancara, dokumen, dan catatan observasi secara mendalam.
- 2) Mengkode data berdasarkan tema yang relevan.
- 3) Menghubungkan temuan dengan prinsip keadilan dalam perspektif syariah.⁶

4. Validitas dan Reliabilitas Data

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi metode (wawancara, dokumen, dan observasi) dan triangulasi sumber (manajer, karyawan, dan nasabah). Selain itu, hasil temuan dikonfirmasi ulang dengan partisipan untuk memastikan kesesuaian interpretasi.

PEMBAHASAN

Kajian Umum Tentang Akad Rahn

Rahn (gadai) adalah akad dalam ekonomi syariah yang memungkinkan jaminan barang sebagai pengganti pembayaran utang. Dalam teori ini, rahn dianggap sebagai alat untuk memberikan kepercayaan dan kepastian bagi pemberi pinjaman tanpa melanggar prinsip syariah yang melarang riba (bunga). Rahn ini bersifat amanah dan barang yang digadaikan tetap milik peminjam, hanya berfungsi sebagai jaminan. Dalam konteks akad rahn tasjili, barang yang digadaikan (kendaraan) tetap berada dalam penguasaan nasabah selama masa pembiayaan.⁷

Rahn secara bahasa berarti menahan atau menjadikan sesuatu sebagai jaminan. Dalam istilah syariah, rahn adalah akad di mana seseorang menyerahkan suatu barang

⁶ Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.

⁷ Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, “Fikih Muamalah” (Rosda, 2019), accessed September 15, 2024, <https://digilib.uinsgd.ac.id/44515/>.

sebagai jaminan utang, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk melunasi utang jika pihak yang berutang gagal memenuhi kewajibannya.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang)." (QS. Al-Baqarah: 283)

A. Rukun dan Syarat Akad Rahn

1. Rukun Rahn

- a. Rahin: Orang yang menggadaikan barang (pemberi gadai).
- b. Murtahin: Penerima gadai (kreditur).
- c. Marhun: Barang yang digadaikan.
- d. Marhun Bih: Utang atau kewajiban yang dijamin dengan barang gadai.
- e. Shighat: Ijab dan qabul yang menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak.

2. Syarat Sah Rahn

- a. Barang yang digadaikan harus memiliki nilai ekonomis dan dapat dijual.
- b. Akad dilakukan secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan.
- c. Barang harus berada dalam penguasaan murtahin atau pihak ketiga yang disepakati.
- d. Utang yang dijamin harus jelas jumlah dan jangka waktunya.

3. Hikmah dan Manfaat Akad Rahn

a. Memberikan Rasa Aman

Rahn memberikan jaminan kepada murtahin bahwa utangnya dapat dilunasi melalui barang yang digadaikan jika rahin tidak mampu melunasi utangnya.

b. Membantu Rahin Mendapatkan Dana

Dengan menyerahkan barang sebagai jaminan, rahin dapat memperoleh dana yang dibutuhkan tanpa harus menjual barang tersebut.

c. Menjaga Hubungan Baik

Rahn mendorong kepercayaan dan kerja sama antara rahin dan murtahin, sehingga hubungan kedua belah pihak tetap harmonis.

Kajian Umum Tentang Kontrak dan Akad

Akad atau kontrak adalah elemen yang sangat penting dalam transaksi syariah karena akad mencakup persetujuan bersama antara dua pihak yang terlibat, dengan syarat-syarat yang jelas dan tidak merugikan salah satu pihak. Kontrak harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam syariah untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sah dan tidak menyalahi prinsip-prinsip Islam.⁸

Dalam konteks akad rahn tasjili pada produk GENERASI, kontrak ini mencakup kesepakatan antara nasabah dan koperasi mengenai pinjaman, jaminan kendaraan, hak dan kewajiban, serta aturan jika terjadi wanprestasi. Teori kontrak ini juga memperhatikan prinsip-prinsip faskh (pembatalan) dan khiyar (pilihan), yang dapat berlaku jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.⁹

Kajian Umum Tentang Teori Keadilan Sosial

Teori Keadilan sosial dalam ekonomi Islam berfokus pada bagaimana distribusi sumber daya, manfaat, dan kewajiban dilakukan secara adil di masyarakat. Dalam konteks pembiayaan syariah, teori ini menekankan pada upaya untuk memberdayakan kelompok yang lebih lemah secara ekonomi, memastikan bahwa pembiayaan tidak menjerumuskan nasabah ke dalam jerat utang yang tidak wajar. Prinsip ini juga terkait dengan pembagian keuntungan dan kerugian yang adil, serta memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan tidak membebani salah satu pihak secara berlebihan.¹⁰

Prinsip keadilan sosial menjadi salah satu landasan utama dalam penerapan akad rahn, terutama dalam produk pembiayaan gadai kendaraan syariah seperti Generasi di KSPS Nuri Jatim. Teori keadilan sosial menekankan pada distribusi yang adil dan manfaat bersama, sehingga semua pihak—baik rahin maupun murtahin—mendapatkan haknya tanpa adanya eksploitasi.¹¹

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi* (UGM PRESS, 2018).

⁹ Ibid.

¹⁰ Arif Maftuhin, *Filantropi Islam: Fikih untuk Keadilan Sosial* (Magnum Pustaka, 2017).

¹¹ Nisa' and Samsuri, "The Competitive Advantages of NURI East Java Savings and Loans Cooperatives and Sharia Financing in the Perspective of the Diamond Strategy."

Prinsip Keadilan Akad Rahn Tasjili Pada Produk Pembiayaan Gadai Kendaraan Syariah (Generasi) Di Ksps Nuri Jatim

Salah satu aspek utama dalam prinsip keadilan dalam pembiayaan syariah adalah transparansi biaya. Dalam konteks akad rahn tasjili, KSPPS NURI Jatim telah memastikan bahwa semua biaya yang terkait dengan pembiayaan kendaraan syariah dijelaskan dengan jelas kepada nasabah sejak awal transaksi. Melalui wawancara dengan beberapa nasabah dan pihak manajemen KSPPS NURI Jatim, ditemukan bahwa koperasi telah memberikan informasi lengkap mengenai biaya yang harus dibayar, termasuk biaya administrasi, biaya asuransi kendaraan yang digadaikan, serta biaya tambahan lainnya yang terkait dengan layanan pembiayaan.¹²

Transparansi ini penting untuk mencegah praktik yang dapat merugikan nasabah, seperti biaya tersembunyi atau biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam akad. Salah satu nasabah yang diwawancarai menjelaskan, "Saya merasa nyaman karena koperasi selalu memberikan informasi yang jelas tentang semua biaya yang harus saya bayar. Tidak ada yang disembunyikan, dan semuanya dijelaskan dengan detail." Hal ini menunjukkan bahwa KSPPS NURI Jatim telah mengimplementasikan prinsip transparansi biaya dengan baik, sesuai dengan kaidah syariah yang mengharuskan setiap transaksi dilakukan secara terbuka dan tidak merugikan salah satu pihak.¹³

Aspek kedua dari prinsip keadilan adalah penetapan margin keuntungan yang wajar. Dalam produk GENERASI, koperasi menerapkan margin keuntungan yang dihitung berdasarkan prinsip syariah, yang menghindari unsur riba (bunga). Margin keuntungan ini dihitung secara adil, berdasarkan nilai kendaraan yang digadaikan dan lama jangka waktu

¹² "Analisis Mekanisme Pembiayaan Pesona (Pembelian Barang Serbaguna) Menggunakan Akad Murabahah Di KSPPS Nuri Jawa Timur Cabang Pegantenan | JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS)," accessed January 7, 2025, <https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/257>.

¹³ Mohammad Zainal Hamdy, "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) NURI Jawa Timur Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: (Studi Kasus KSPPS Cabang Palengaan Kec. Palengaan Kabupaten Pamekasan)," *Journal of Economic and Islamic Research* 1, no. 01 (November 27, 2022): 29–43.

pembiayaan. Selama proses penelitian, ditemukan bahwa KSPPS NURI Jatim menetapkan margin keuntungan yang sesuai dengan pasar, yang memberikan keuntungan bagi koperasi tetapi tetap memperhatikan kemampuan bayar nasabah.¹⁴

Melalui observasi dan wawancara dengan pihak koperasi, diketahui bahwa margin keuntungan yang dikenakan kepada nasabah adalah hasil dari kesepakatan yang adil antara koperasi dan nasabah, tanpa adanya paksaan. Nasabah diberi keleluasaan untuk memilih jangka waktu pembiayaan yang sesuai dengan kemampuannya, dan koperasi memberikan penjelasan mengenai bagaimana margin keuntungan tersebut dihitung. Salah satu pengurus koperasi menyatakan, "Kami berusaha agar margin keuntungan yang dikenakan pada nasabah tidak memberatkan, dan kami pastikan margin tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam syariah."¹⁵

Aspek ketiga yang dianalisis adalah pemenuhan hak dan kewajiban yang proporsional antara pihak koperasi dan nasabah. Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam sebuah transaksi. Dalam produk GENERASI, nasabah memiliki hak untuk menggunakan kendaraannya selama masa pembiayaan, dengan kewajiban untuk membayar cicilan sesuai dengan yang disepakati. Sementara itu, koperasi memiliki hak untuk menerima pembayaran tepat waktu dan kewajiban untuk menjaga kendaraan yang digadaikan dengan baik selama masa pembiayaan.¹⁶

Berdasarkan wawancara dengan nasabah, ditemukan bahwa koperasi selalu mematuhi hak nasabah untuk menggunakan kendaraan yang digadaikan, kecuali dalam kasus-kasus tertentu seperti gagal bayar atau keterlambatan pembayaran yang menyebabkan kendaraan disita. Salah satu nasabah mengungkapkan, "Saya tidak pernah merasa dirugikan karena koperasi selalu menjaga kendaraan saya dengan baik, dan mereka

¹⁴ "TRANSAKSI PEMBELIAN SMART PHONE DENGAN MODEL AKAD MURABAHAH DI KSPPS NURI JATIM CAB. AMBUNTEN | Prospeks: Prosiding Pengabdian Ekonomi Dan Keuangan Syariah," accessed January 7, 2025, <https://jurnalalkhairat.org/ojs/index.php/prospeks/article/view/263>.

¹⁵ Saputra Adiwijaya et al., *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

¹⁶ Achmat Badrud Taufik, "Analisis Strategi Pelayanan Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis Di KSPPS Nuri Jawa Timur Cabang Palduding" (diploma, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2020), accessed January 7, 2025, <http://etheses.iainmadura.ac.id/1633/>.

memberikan kelonggaran jika saya mengalami kesulitan dalam membayar cicilan." Hal ini menunjukkan bahwa KSPPS NURI Jatim berusaha memenuhi hak dan kewajiban kedua belah pihak dengan proporsional, menciptakan keseimbangan yang adil dalam transaksi pembiayaan.

Dalam ekonomi Islam, prinsip keadilan menjadi landasan utama dalam setiap transaksi keuangan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam teori ekonomi Islam, transaksi yang dilakukan harus bebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (perjudian), serta harus memberikan keuntungan yang seimbang bagi kedua belah pihak. Dalam konteks akad rahn tasjili, prinsip keadilan ini tercermin dalam bagaimana koperasi mengatur hubungan dengan nasabah, mulai dari transparansi biaya hingga pemenuhan hak dan kewajiban secara adil.¹⁷

Prinsip keadilan ini juga sejalan dengan pandangan para ulama seperti Al-Ghazali yang menekankan bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan itikad baik dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam hal ini, KSPPS NURI Jatim telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip tersebut, yang dapat dilihat dari penerapan transparansi biaya, penetapan margin keuntungan yang wajar, dan pemenuhan hak dan kewajiban yang proporsional antara koperasi dan nasabah.¹⁸

Penerapan prinsip keadilan dalam produk pembiayaan gadai kendaraan syariah (GENERASI) memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan produk ini di pasar. Dengan memastikan bahwa semua aspek dalam akad rahn tasjili diterapkan sesuai dengan prinsip syariah, KSPPS NURI Jatim mampu menjaga kepercayaan nasabah dan meningkatkan kepuasan mereka. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah nasabah yang menggunakan produk GENERASI dan semakin berkembangnya jangkauan layanan koperasi ke berbagai daerah di Jawa Timur.¹⁹

Melalui penerapan prinsip keadilan ini, koperasi tidak hanya menciptakan transaksi yang adil, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang dengan nasabah yang berbasis pada kepercayaan. Salah satu nasabah yang diwawancarai menyatakan, "Saya sudah lama

¹⁷ Hs, "Wawancara Langsung Dengan Nasabah KSPS Nuri," January 1, 2025.

¹⁸ Imam al-Ghazali, *Ringkasan Ihya' Ulumuddin* (Akbar Media, 2008).

¹⁹ Anshori, *Hukum perjanjian Islam di Indonesia*.

menggunakan produk GENERASI karena saya merasa koperasi ini selalu menjaga kepentingan saya sebagai nasabah. Tidak hanya itu, mereka juga memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam proses pembiayaan.²⁰

Selain itu, penerapan prinsip keadilan dalam pembiayaan syariah juga berdampak pada keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat. Dengan adanya pembiayaan yang adil, masyarakat yang sebelumnya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan finansial kini dapat memanfaatkan produk GENERASI untuk memperoleh dana dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah.

Penerapan prinsip keadilan dalam akad rahn tasjili pada produk GENERASI di KSPPS NURI Jatim dapat dilihat dari pemeliharaan hak nasabah atas barang yang digadaikan (kendaraan). Meskipun kendaraan dijadikan jaminan, nasabah tetap dapat menggunakan kendaraan tersebut selama masa pembiayaan, yang merupakan salah satu bentuk perlindungan hak peminjam. Ini sejalan dengan prinsip syariah dalam rahn yang menekankan bahwa barang yang digadaikan tetap milik peminjam dan hanya berfungsi sebagai jaminan.

Selain itu, keadilan juga diterapkan dalam penetapan margin keuntungan yang dikenakan pada nasabah. Margin keuntungan yang ditetapkan oleh KSPPS NURI Jatim bersifat wajar dan sesuai dengan kemampuan bayar nasabah, tidak memberatkan atau melanggar prinsip syariah. Dengan demikian, dalam konteks teori rahn, koperasi telah memperlakukan nasabah dengan adil tanpa merugikan pihak mana pun, menjaga kepercayaan dan transparansi dalam setiap transaksi.²¹

Prinsip keadilan dalam teori kontrak tercermin dalam bagaimana KSPPS NURI Jatim memastikan bahwa akad yang dilakukan antara koperasi dan nasabah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam syariah. Setiap kesepakatan dilakukan dengan transparansi penuh mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Nasabah diberi pemahaman yang jelas tentang haknya atas kendaraan yang digadaikan, kewajibannya

²⁰ Rosyidi, "Wawancara Langsung Dengan Nasabah Nuri," January 5, 2025.

²¹ "SENGKETA JAMINAN TANAH PADA AKAD RAHN (STUDI KASUS KSPPS NURI JATIM CABANG PASONGSONGAN) | Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa," accessed January 7, 2025, <https://www.journal.lppmpelitabangsa.id/index.php/jespb/article/view/772>.

untuk membayar cicilan, serta konsekuensi jika terjadi keterlambatan pembayaran atau wanprestasi.

Lebih lanjut, teori kontrak juga memperhatikan prinsip faskh (pembatalan) dan khiyar (pilihan). KSPPS NURI Jatim memberikan keleluasaan kepada nasabah untuk memilih jangka waktu pembiayaan sesuai dengan kemampuannya, yang memungkinkan nasabah untuk tidak terbebani dengan cicilan yang terlalu tinggi. Dalam hal terjadi wanprestasi, koperasi menyediakan opsi bagi nasabah untuk melakukan penyelesaian secara baik, baik melalui perpanjangan waktu pembayaran atau pengaturan ulang cicilan. Prinsip ini menunjukkan bahwa koperasi menjaga keseimbangan dan keadilan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta memperlakukan nasabah dengan penuh pengertian.

KSPPS NURI JATIM mengimplementasikan prinsip keadilan sosial dalam operasional produk GENERASI dengan memberikan pembiayaan kepada kelompok yang lebih membutuhkan, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan dalam akses ke lembaga keuangan konvensional. Dengan menyediakan produk pembiayaan yang berbasis syariah, koperasi membantu masyarakat untuk mendapatkan dana yang diperlukan tanpa melanggar prinsip syariah, yang melarang riba dan praktik-praktik yang merugikan.²²

Dalam hal ini, koperasi menghindari praktik-praktik pembiayaan yang dapat membebani nasabah dengan bunga yang tidak wajar atau biaya tersembunyi. Pembiayaan yang diberikan melalui produk GENERASI juga memperhatikan kemampuan nasabah untuk membayar cicilan sesuai dengan kondisi ekonomi mereka, dengan tujuan untuk tidak menjerumuskan nasabah ke dalam beban utang yang berlebihan. Hal ini mencerminkan upaya koperasi untuk menjaga kesejahteraan sosial-ekonomi nasabahnya, serta memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan tidak merugikan salah satu pihak, sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam ekonomi Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis penerapan prinsip keadilan dalam akad rahn tasjili pada produk pembiayaan gadai kendaraan syariah (GENERASI) di KSPPS NURI JATIM, dapat

²² Taufik, "Analisis Strategi Pelayanan Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis Di KSPPS Nuri Jawa Timur Cabang Palduding."

disimpulkan bahwa koperasi ini telah berhasil mengimplementasikan prinsip keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penerapan prinsip keadilan terlihat melalui berbagai mekanisme yang diterapkan dalam operasional produk ini, yang melibatkan transparansi biaya, penetapan margin keuntungan yang wajar, dan pemenuhan hak dan kewajiban antara koperasi dan nasabah secara proporsional.

Tiga teori utama yang digunakan dalam analisis ini—yaitu teori rahn, teori kontrak, dan teori keadilan sosial dalam ekonomi Islam—membuktikan bahwa KSPPS NURI JATIM telah menempatkan nasabah pada posisi yang adil, dengan memperhatikan hak mereka atas barang yang digadaikan (kendaraan) yang tetap berada dalam penguasaan nasabah selama masa pembiayaan. Selain itu, kesepakatan yang tercapai melalui akad rahn tasjili telah memenuhi rukun dan syarat yang sah menurut syariah, dengan penjelasan yang jelas mengenai hak dan kewajiban pihak koperasi dan nasabah. Pembiayaan yang diberikan juga tidak membebani nasabah dengan utang yang tidak wajar, sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam ekonomi Islam yang mengutamakan distribusi sumber daya yang adil dan memberdayakan kelompok yang lebih lemah secara ekonomi.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip keadilan dalam produk GENERASI di KSPPS NURI JATIM memberikan dampak positif terhadap masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan dalam mengakses pembiayaan konvensional. Koperasi ini tidak hanya menjaga prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi, tetapi juga berkomitmen untuk memastikan kesejahteraan sosial-ekonomi anggotanya. Dengan demikian, produk GENERASI tidak hanya memenuhi kaidah-kaidah syariah, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian umat dan memastikan terciptanya keadilan dalam setiap transaksi pembiayaan. Berdasarkan analisis penerapan prinsip keadilan dalam akad rahn tasjili pada produk pembiayaan gadai kendaraan syariah (GENERASI) di KSPPS NURI JATIM, dapat disimpulkan bahwa koperasi ini telah berhasil mengimplementasikan prinsip keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penerapan prinsip keadilan terlihat melalui berbagai mekanisme yang diterapkan dalam operasional produk ini, yang melibatkan transparansi biaya, penetapan margin

keuntungan yang wajar, dan pemenuhan hak dan kewajiban antara koperasi dan nasabah secara proporsional.

Tiga teori utama yang digunakan dalam analisis ini—yaitu teori rahn, teori kontrak, dan teori keadilan sosial dalam ekonomi Islam—membuktikan bahwa KSPPS NURI JATIM telah menempatkan nasabah pada posisi yang adil, dengan memperhatikan hak mereka atas barang yang digadaikan (kendaraan) yang tetap berada dalam penguasaan nasabah selama masa pembiayaan. Selain itu, kesepakatan yang tercapai melalui akad rahn tasjili telah memenuhi rukun dan syarat yang sah menurut syariah, dengan penjelasan yang jelas mengenai hak dan kewajiban pihak koperasi dan nasabah. Pembiayaan yang diberikan juga tidak membebani nasabah dengan utang yang tidak wajar, sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam ekonomi Islam yang mengutamakan distribusi sumber daya yang adil dan memberdayakan kelompok yang lebih lemah secara ekonomi.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip keadilan dalam produk GENERASI di KSPPS NURI JATIM memberikan dampak positif terhadap masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan dalam mengakses pembiayaan konvensional. Koperasi ini tidak hanya menjaga prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi, tetapi juga berkomitmen untuk memastikan kesejahteraan sosial-ekonomi anggotanya. Dengan demikian, produk GENERASI tidak hanya memenuhi kaidah-kaidah syariah, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian umat dan memastikan terciptanya keadilan dalam setiap transaksi pembiayaan.

DAFTAR RUJUKAN

- Adiwijaya, Saputra, Anugerah Tatema Harefa, Santi Isnaini, Syarifa Raehana, Budi Mardikawati, dr Rudy Dwi Laksono, Saktisyahputra Saktisyahputra, et al. *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. UGM PRESS, 2018.
- al-Ghazali, Imam. *Ringkasan Ihya' Ulumuddin*. Akbar Media, 2008.
- Hamdy, Mohammad Zainal. "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) NURI Jawa Timur Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: (Studi Kasus KSPPS Cabang Palengaan Kec. Palengaan Kabupaten Pamekasan)." *Journal of Economic and Islamic Research* 1, no. 01 (November 27, 2022): 29–43.
- Hs. "Wawancara Langsung Dengan Nasabah KSPS Nuri," January 1, 2025.
- Maftuhin, Arif. *Filantropi Islam: Fikih untuk Keadilan Sosial*. Magnum Pustaka, 2017.
- Muhaini, Fahrizal. "Pengaruh Kualitas Layanan Dan Citra Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Minat Menabung Anggota Di KSPPS NURI JATIM Cabang Pakong Pamekasan." Diploma, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA, 2024. Accessed January 7, 2025. <http://etheses.iainmadura.ac.id/7616/>.
- Nisa', Rifqun, and Andriani Samsuri. "The Competitive Advantages of NURI East Java Savings and Loans Cooperatives and Sharia Financing in the Perspective of the Diamond Strategy." *International Conference on Islamic Economic (ICIE)* 1, no. 2 (2022): 310–328.
- Rosyidi. "Wawancara Langsung Dengan Nasabah Nuri," January 5, 2025.
- Siregar, Hariman Surya, and Koko Khoerudin. "Fikih Muamalah." Rosda, 2019. Accessed September 15, 2024. <https://digilib.uinsgd.ac.id/44515/>.
- Taufik, Achmat Badrud. "Analisis Strategi Pelayanan Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis Di KSPPS Nuri Jawa Timur Cabang Palduding." Diploma, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2020. Accessed January 7, 2025.

<http://etheses.iainmadura.ac.id/1633/>.

- “Analisis Mekanisme Pembiayaan Pesona (Pembelian Barang Serbaguna) Menggunakan Akad Murabahah Di KSPPS Nuri Jawa Timur Cabang Pegantenan | JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS).” Accessed January 7, 2025. <https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/257>. “Sekilas Sejarah » KSPPS NURI JATIM.” *KSPPS NURI JATIM*, n.d. Accessed January 7, 2025. <https://nurijatim.com/sekilas-sejarah/>.
- “SENGKETA JAMINAN TANAH PADA AKAD RAHN (STUDI KASUS KSPPS NURI JATIM CABANG PASONGSONGAN) | Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa.” Accessed January 7, 2025. <https://www.journal.lppmpelitabangsa.id/index.php/jespb/article/view/772>.
- “TRANSAKSI PEMBELIAN SMART PHONE DENGAN MODEL AKAD MURABAHAH DI KSPPS NURI JATIM CAB. AMBUNTEN | Prospeks: Prosiding Pengabdian Ekonomi Dan Keuangan Syariah.” Accessed January 7, 2025. <https://jurnalalkhairat.org/ojs/index.php/prospeks/article/view/263>.
- Yin, R. K. (2011). *Qualitative Research from Start to Finish*. New York: The Guilford Press.